

**RAGAM ISLAM DI ERA GLOBALISASI:
PERSPEKTIF SARJANA BARAT DAN PERSPEKTIF SARJANA ISLAM**

Musa Maliki dan Nurmasari Situmeang

(Dosen HI- FISIP UPN "Veteran" Jakarta dan Ketua Prodi HI- FISIP UPN "Veteran"
Jakarta)

Abstract

Globalization constructs many faces of Islam. From the perspective of western scholars, a face of Islam i.e. fundamentalist Islam is regarded as a determinant influencing factor in world politics. It becomes the menace of Western civilization and it is, to some extent, being attached to terrorism by many Western scholars. However, there is also another face of moderate Islam which can be partner to the Western civilization. This article is trying to explain that globalization era is the cause of the existence of various colours of Islam in world politics.

Keyword: Globalisasi, Agama, Islam Ideologis, Islam Militan, Problem Identitas dan Otentisitas

Pendahuluan

Dalam konteks Studi Hubungan Internasional (SHI), pengakuan Islam sebagai peradaban dalam politik dunia masih dalam konteks pro dan kontra. Yang pro dapat dilihat dari karya Martin Wight, *International Theory: Three Traditions* (1991) yang berargumen bahwa Islam memberi kontribusi positif dalam SHI. Sedangkan yang kontra dapat dilihat dalam karya Andrew Phillips *War, Religion and Empire: The Transformation of International Orders* (2011) yang berargumen bahwa peradaban dunia dibentuk dari peradaban Cina, India, Kristen, lalu diteruskan dengan peradaban Barat tanpa memaparkan Islam sebagai bagian dari suatu peradaban atau benbentuk

peradaban sekarang. Padahal, Islam adalah agama, ajaran, sekaligus kebudayaan yang mendunia. Walaupun lahir di wilayah Arab, dalam proses penyebarannya, Islam telah mengglobal.

Bagi pihak pelaku Islam, agama Islam sudah begitu beragam interpretasinya dan hal tersebut ditambah lagi dengan para non-Islam yang memberikan warna pengaruhnya. Misalnya, non-Islam di wilayah Barat memberi pengaruh yang sangat kuat di era kejayaannya seperti dipaparkan di bawah ini oleh para sarjana Barat seperti Francis Fukuyama dan Samuel Huntington. Hal ini kemudian mendorong Islam dan para pelakunya merasa harus membela Islam dari ancaman Barat.

Ada pendapat bahwa Islam tidak akan bertahan di era globalisasi, sehingga Islam bertindak reaksionis dan konfrontasi dengan pihak yang diuntungkan di era globalisasi (Samuel P. Huntington, 1984: 214; Gilles Kepel, *The Revenge of God*, 1994: 94; Bernard Lewis, 1996: 5). Menurut mereka, Islam sudah ketinggalan zaman dan sistem Islam kurang relevan menghadapi perubahan era globalisasi. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa Islam relevan dengan era globalisasi (John L. Esposito and James Piscatory, 1991; John L. Esposito, 1992; John O. Voll and John L. Esposito, 1994; John O. Voll and John L. Esposito, 1996). Dari dua perdebatan ini, artikel ini berargumen bahwa era globalisasi membentuk Islam yang beragam baik dalam perspektif sarjana Barat maupun perspektif sarjana Islam. Di bawah ini akan dipaparkan kedua pandangan tersebut, sehingga perdebatan yang terjadi dapat lebih mempunyai objektivitas dari sarjana Barat dan sarjana Islam sendiri.

Tulisan ini akan diawali dengan pemaparan batasan globalisasi, lalu memaparkan tentang agama di era globalisasi, dan berikutnya memaparkan ragam Islam di era globalisasi. Dalam kesimpulan, tulisan ini menegaskan kembali bahwa Islam selalu dipahami dua sisi, yakni positif dan negatif.

Globalisasi

Dalam penulisan karyanya, *A Future Perfect: the Challenge and Hidden Promise of Globalization* (2001:vii), John

Micklethwait dan Adrian Wooldridge berargumen bahwa globalisasi mendekatkan ruang dan memampatkan waktu. Micklethwait dan Wooldridge mengisahkan sebuah cerita tentang pengalamannya hidup di era globalisasi. Pada awalnya mereka yakin menempati ruang pada perjalanan dari Los Angeles dan New York, di dalam pesawat Amerika Serikat (AS) dan memakai laptop buatan AS, IBM. Namun keyakinan ini menjadi pudar ketika mereka sadar bahwa badan pesawat tersebut dirakit dari empat puluh negara yang berbeda, laptop IBM itu dibuat di Meksiko, dan negeri AS sendiri tidak terdiri dari masyarakat AS sebagaimana kita pahami terdapat 'masyarakat asli AS'. Micklethwait dan Wooldridge berusaha menunjukkan bahwa dunia kita menjadi semakin kecil saja dan ruang menjadi pudar.

Berikut pendapat peneliti lain mengenai globalisasi: Robertson mengilustrasikan globalisasi sebagai dunia yang semakin padat dan menyatu; sarjana Hubungan Internasional Keohane dan Nye melihat globalisasi sebagai interdependensi antar bangsa; Hirst dan Thompson menggambarkan globalisasi sebagai naiknya kegiatan perdagangan dan investasi kapital antar negara; Sander mengasosiasikannya dengan penyatuan kegiatan ekonomi; Spybey dan Taylor menamainya dengan amerikanisasi; Khor dan Ling mendefinisikannya sebagai kolonialisasi Negara Maju; Hertz melihatnya sebagai

kehancuran budaya lokal; David Held menamai globalisasi dengan demokrasi kosmopolitan; bagi McGrew, globalisasi adalah transformasi organisasi sosial; Nieminen melihatnya sebagai proses penyatuan sistem sosial dunia; David Korten menunjukkan era globalisasi dengan limbah dan industrialisasi yang berbahaya; Scott dan Meyer melihatnya sebagai pengaruh masyarakat internasional terhadap sistem kenegaraan; Hayek dan Friedman melihatnya sebagai neoliberal yang mengedepankan pasar bebas; Fukuyama melihatnya sebagai kemenangan demokrasi liberal; Karl Polanyi melihatnya sebagai kegagalan neoliberalisme ekonomi; Robert Gilpin melihatnya sebagai kemenangan korporasi besar; Heredia dan Purcell melihatnya sebagai degradasi pertanian; dan masih banyak lagi peneliti lain yang mengilustrasikan definisi atau deskripsi tentang globalisasi (Nanang Mugasejati dan Ucu Martanto, 2006). Jadi, globalisasi memang mempunyai banyak rupa untuk dipahami dan diinterpretasikan.

Sementara itu, Jan Aart Scholte (John Baylis dan Steve Smith, 2001: 14) memberikan klasifikasi aspek globalisasi: *Pertama, Internationalization* yang mengacu pada peningkatan hubungan lintas-batas negara serta ketergantungan antar negara. *Kedua, Liberalization* yang berarti penghapusan batasan-batasan yang ditetapkan pemerintah agar tercipta ekonomi dunia yang terbuka dan terintegrasi. *Ketiga,*

Universalization yang berarti mengacu pada penyebaran nilai-nilai antar manusia dari berbagai penjuru dunia untuk menjadi tata nilai yang tunggal dan berlaku bagi semua pihak (masyarakat internasional). *Keempat, Westernization* yang berarti nada kritik terhadap globalisasi sebagai media penyebaran norma-norma Barat –terutama Amerika Serikat, menuju ke seluruh penjuru dunia. *Kelima, Deterritorialization* yang berarti mengacu pada terkikisnya batasan (nyata) dan jarak geografis. Kelima pemahaman tersebut menurut Scholte bisa saling tumpang tindih dalam penggunaannya, meskipun masing-masing memiliki penekanan yang berbeda satu sama lain.

Studi Scholte menekankan empat poin: *pertama*, globalisasi menekankan pada demokrasi liberal konvensional, dengan fokusnya pada penentuan nasib bangsa melalui negara teritorial. Misalnya penyebaran sistem demokrasi liberal model Amerika Serikat ke seluruh penjuru dunia dalam bentuk negara berdaulat (batas negara). Namun era globalisasi ini tidak hanya membutuhkan negara demokratis sebagai entitas independen (otonom), tetapi era globalisasi adalah proses internasionalisasi budaya demokratis dalam masyarakatnya semacam demokrasi kosmopolitan dan wadah multilateral dalam kerangka negara-bangsa, sehingga batas negara dan infiltrasi berbagai macam aspek dapat terjadi dari luar negeri ke dalam negeri. *Kedua*, otonomi daerah adalah

bagian dari efek globalisasi dalam penyebaran potensi-potensi praktek demokrasi, tetapi keuntungan tersebut tidak berjalan otomatis (alamiah). Otonomi daerah dalam beberapa kasus justru pemaksaan demokrasi dari pusat ke daerah. misalnya, konteks Spanyol, demokrasi justru terjadi penekanan pemerintah pusat ke wilayah local lainnya, semacam demokrasi *top-down*. Singkatnya, demokrasi yang seharusnya lahir dari rakyat sendiri justru suatu pemaksaan dari pusat ke local. *Ketiga*, rezim negara yang paling tinggi (baik regional maupun global) telah mengembangkan penurunan kualitas demokrasi yang cukup mendasar. Misalnya Amerika Serikat justru menjalankan proses penyeragaman budaya atau beberapa sarjana menyebutnya Amerikanisasi seperti pemaksaan nilai-nilai demokrasi dan liberalism ke Negara Dunia Ketiga atau Negara Berkembang –tepatnya penyerangan Amerika Serikat ke Irak adalah bagian dari agenda demokratisasi dan liberalisasi. Hal ini mengingkari spirit demokrasi sejati yakni pluralisme atau pengakuan terhadap perbedaan. *Keempat*, kekuatan non-negara (pasar global, komunikasi global, dan masyarakat sipil global) terkadang menguat, tetapi juga sering mengurangi kualitas demokrasi seperti adanya rasisme yang meningkat dan terorisme.

Agama dan Globalisasi

Menurut Dwight N. Hopkins dalam karyanya, *Religion/ Globalizations* (2001), globalisasi seringkali diilustrasikan dengan kapital finansial dan kelanjutan dari imperialisme dalam bentuknya yang berbeda yaitu imperialisme baru. Hopkins juga memaparkan pendapat lain tentang globalisasi, yaitu proses modernisasi yang sangat berkuasa, kolonialisasi, dan pasca-modernitas. Pada era globalisasi, yang terjadi adalah proses homogenisasi, yang disebutkannya sebagai McDonaldisasi dan MTVisasi (Benjamin R. Barber, 2002; George Ritzer, 2002). Hopkins juga memaparkan negativitas globalisasi yang berarti kerusakan alam, wabah penyakit, instabilitas ekonomi nasional, homogenisasi budaya, kehancuran industri film nasional, kepunahan budaya lokal, migrasi, dan *sex tourism*. Sedangkan hal positif dalam globalisasi diantaranya ialah demokratisasi, HAM (termasuk perempuan, lesbian, dan homo), proteksi keanekaragaman hayati, dan perkembangan NGO (Ibid.)

Menurut Hopkins dalam artikelnya, "The Religion of Globalization", agama sangat fundamental dalam globalisasi. Prinsip agama menggerakkan mekanisme globalisasi. Hopkins berargumen kapitalisme monopolistik yang ada di era globalisasi adalah agama baru. Tuhan dari agama globalisasi adalah prinsip kekayaan kapitalisme finansial. Hal ini mengartikulasi

kekuasaan melalui trinitas ketuhanan, yakni Bank Dunia, IMF, dan WTO. Hopkins memaparkan sejarah kekayaan kapitalisme finansial sebagai Tuhan baru era globalisasi sampai pada titik dimana, kapitalisme finansial menjadi teologi pembebasan.

Teologi pembebasan ini digerakkan oleh rasionalitas. Rasionalitas adalah instrumen dalam menjustifikasi makna terciptanya Tuhan kapitalisme finansial. Teologi berasal dari etimologi: "theo" yang diartikan Tuhan dan "logos" yang diartikan ilmu. Jadi teologi adalah ilmu tafsir, pemahaman, penjelasan, kemasukakalan tentang sesuatu atau seseorang atau Tuhan (hlm. 8).

Rasionalitas memberi kebebasan kepada manusia dalam memenuhi harapan hidupnya. Dengan rasionalitas, teologi pembebasan dapat beroperasi di era globalisasi. Hal ini dapat pula diistilahkan dengan teologi globalisasi, sebab teologi pembebasan ini hadir di era globalisasi untuk menggerakkan kapitalisme finansial atau lebih populer dengan sebutan neoliberal. Rukun iman dari neoliberal adalah pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi. Ketiga rukun ini menjalankan kehendak Tuhan kekayaan kapitalis finansial monopolistik.

Dalam sejarah, agama bermula dari teologi Cina, Hindu, Budha, Kristen, Islam dan yang lainnya. Hopkins menyebut teologi Islam berawal dari Semenanjung Arab lalu ke Cordoba dan berakhir di Konstantinopel. Bagi

Hopkins, teologi Islam sudah lama tergantikan dengan teologi globalisasi atau teologi neoliberal.

Dalam buku yang sama, "Society's Religion: The Rise of Social Theory, Globalization, and the Invention of Religion", Eduardo Mendieta berpendapat bahwa dalam globalisasi, agama tidak musnah. Agama justru berelaborasi dengan globalisasi. Di dalam era globalisasi agama mempunyai kreasi untuk bertransformasi menjadi suatu kesadaran yang justru kuat. Globalisasi dalam pemahaman Mendieta bukanlah teologi neoliberal, tetapi lebih sebagai refleksi modernitas. Dalam refleksi modernitas, agama dan sekulerisme justru berbagi. Jadi globalisasi adalah sekulerisme baru yang mendorong transformasi logika refleksi modernitas secara radikal pada konsep negara, masyarakat sipil, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya dengan dimensi-dimensi barunya (ibid.)

Islam dan Globalisasi

Di era globalisasi Islam dipahami secara beragam melalui perspektif para sarjana Barat dan Islam. Bagi sarjana Barat, Mark Juergensmeyer membagi Islam menjadi Islam ideologis dan Islam militan. Dalam artikel "The Global Rise of Religious Nationalism" (ibid.), Mark berpendapat bahwa globalisasi melahirkan Islam yang berwajah ideologis dan militan. Keduanya lahir ditengah gelombang modernitas yang

trauma atas peristiwa sejarah Imperium Roma. Keduanya adalah respon terhadap gelombang modernitas agar tetap dapat beradaptasi dan bertahan hidup.

Pertama, Mark memaparkan tentang Islam ideologis. Islam ideologis dapat ditandai dengan negara Islam Palestina, jika Palestina merdeka. Inilah yang oleh Mark dinamai dengan nasionalisme religious yang juga bergerak di wilayah Chechnya, Tajikistan, Bosnia, dan Kashmir. Ideologi ini sangat terkait dengan ide dan kepercayaan, posisi, nilai, dan moral. Ideologi ini adalah bentuk abstrak dari nasionalisme religious, yakni kombinasi antara kepercayaan agama yang berlandaskan hukum agama (suci) dengan otoritas agama yang dicangkokkan ke dalam konsep negara berdaulat.

Selain hal di atas, Mark juga mencontohkan Revolusi Iran yang juga lahir sebagai Islam ideologis. Negara Iran pasca revolusi 1979 dinamakan negara Islam, yakni politik ditentukan oleh otoritas Islam. Dasar-dasar politik ditentukan oleh ulama Ayatullah Ruhollah Khomeini dalam menciptakan keadilan moral. Semua hal tersebut ada di dalam konstitusi Republik Islam Iran. Apa yang dipaparkan Mark menunjukkan bahwa modernitas yang menggulirkan globalisasi justru balik menghajar spirit modernitas yang berusaha memisahkan diri dari agama, yakni dengan kebangkitan Islam ideologis dalam spirit nasionalisme religious.

Kedua, Mark memaparkan tentang Islam militan. Islam militan lahir dalam rangka mengkritik Islam moderat. Keduanya seperti dua mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Islam militan, Islam moderat adalah aliran penghalang terbentuknya negara Islam. Jadi Islam militan adalah sekelompok masyarakat yang bercita-cita mendirikan negara dengan ideologi Islam sebagai fondasinya. Kasus pembunuhan Presiden Mesir, Anwar Sadar adalah buah dari Islam militan, Gamaa Al-Islamiya.

Perbedaan Islam militan dengan Islam ideologis adalah gerakan Islam militan melakukan tindak kekerasan dan perlawanan terhadap segala hal yang terkait dengan symbol-simbol sekulerisme dan dunia Barat. Islam militant ini lebih bergerak transnasional dibandingkan Islam ideologis yang konsentrasi pada negaranya sendiri. Singkat kata, Islam militan lebih pada perlawanan terhadap peradaban Barat sekuler lintas negara. Sedangkan Islam ideologis pada basis negaranya. Misalnya, ketua gerakan Gamaa Al-Islamiya, Sheik Omar Abdul Rahman pindah ke New Jersey untuk melakukan aksi pengeboman WTC (26/2/1993) yang menewaskan enam orang dan ribuan luka-luka. Fenomena ini bukanlah tindakan Islam ideologis dalam bentuk nasionalisme religious, tetapi Abdul Rahman adalah seorang Islam militan. apa yang dilakukan oleh Abdul Rahman dipahami oleh masyarakat Barat, sarjana Barat, dan Islam

modernias sebagai kelompok teroris (isme). Sebaiknya, bagi Islam militan, pengeboman WTC adalah perjuangan Islam dalam menegakkan keadilan dan ancaman ke-Islaman lingkungan mereka.

'Teroris' ini diawali dengan ketidakpuasan terhadap ideologi nasionalisme sekuler. Ideologi yang diidentifikasi sebagai setan ini perlu diganti dengan Islam. Para pejuang melihat dunia sebagai konfrontasi antara yang Islam dengan yang kafir. hal inilah yang terulangi kembali dengan pengeboman WTC 9/11, 2001 dan menginspirasi beberapa kelompok Islam militant lainnya seperti pengeboman di Bali, Indonesia (A. Safril Mubah, 2012: 136-137). Bentuk semacam ini sungguh berbeda dengan konfrontasi antara kapitalisme sekuler dengan komunisme sekuler di era Perang Dingin yang berpusat pada hubungan antar negara.

Sarjana Barat, Simon Murden (John Baylis dan Steve Smith, 2001: 456-469) melihat agama Islam ada dua, yakni Islam militan dan Islam moderat. Pemaparan Murden lebih khawatir terhadap Islam militan. Sebagai penulis isu-isu studi Hubungan Internasional, Murden tampak pesimis terhadap perkembangan Islam moderat. Menurutnya, Islam militant justru berkembang lebih kuat dan universal melawan liberalism Barat. Menurut Murden, globalisasi memediakan, menyediakan member kontribusi bagi Islam militant untuk melawan modernitas Barat yang liberal.

Globalisasi memberi peluang bagi suatu budaya Islam militan menjadi Islam global militan. Islam militan mengkritik modernitas Barat yang liberal sebagai tradisi individualisme egoistik (acuh), sombong, menganut seks bebas, liberal-kapitalisme eksploitatif, dan kebobrokan moral. Murden juga memaparkan bahwa budaya pop dikritik dan dihadang di Saudi Arabia dan Iran serta kekerasan yang terjadi di Mesir, Algeria, dan India.

Jika dianalisis, pandangan Mark dan Murden berbeda dalam konteks Islam militan. Jika Mark melihat bahwa Islam militan berbeda dengan Islam ideologis, sementara Murden melihat Islam militan dan ideologis sama. Jika Mark melihat Iran sebagai Islam ideologis, tetapi Murden melihatnya Islam militan dan juga ideologis. Oleh sebab itu, Murden melihat Iran adalah Islam militan dan ideologis yang menolak segala hal yang berbau Barat seperti berita, musik, video, dan film Barat. Sedangkan persamaan dari Mark dan Murden adalah sama-sama melihat bahwa globalisasi yang membawa misi anti-agama justru melahirkan kebangkitan Islam.

Pandangan Murden tentang Islam militan mengisahkan tokoh Mesir, Sayyed Quth, penggerak ideologi Islam. Selain Quth, Abu al-Ala al-Mawdudi di Pakistan dan Ruhollah Khomeini di Iran bercita-cita mendirikan negara Islam yang berdasarkan syariah Islam yang menyeru Jihad dan mati Syahid. Bagi Islam militan, al Quran dan

Hadist adalah sumber konstitusi yang sempurna, di mana kedaulatan negara berada di bawah kekuasaan Tuhan. Biasanya sistem semacam ini dinamai *syuro* tanpa istilah/embel-embel demokrasi. Hukuman Islam dalam pemaparan Murden masih dalam hukum kekerasan di ruang publik (rajam) dan potong tangan. Selain itu, peraturan perempuan dan non-muslim pun tidak ada perubahan.

Murden juga memperdalam pemaparan Islam militan sampai pada pengisahan riwayat Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi yang tengah menyebar ke seluruh Suriah, Palestina, Jordania, dan Afrika Utara. Organisasi ini didirikan pada 1928 oleh Hasan al Banna di Mesir. Pendapat Murden, Ikhwanul Muslimin adalah gerakan kebangkitan Islam militan yang menggunakan cara-cara kekerasan. Kebangkitan Islam dengan adanya gerakan Islam militan merupakan radikalisme Islam aliran sunni yang dominan dalam politik dunia. Pada masa pemerintahan Nasser, Sayyid Quth yang pada saat itu merupakan bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin mengeksekusi Nasser yang sekuler (1966). Quth mempunyai pandangan bahwa pemerintahan Nasser adalah sekulerisme Barat. Sekulerisme Barat adalah jahiliyah modern, yakni kondisi yang sama dengan era sebelum Nabi Muhammad diturunkan di Mekkah. Oleh sebab itu, sekulerisme Barat harus diperangi dengan jihad. Kesimpulan dari kasus Ikhwanul

Muslimin ini, Murden mencontohkan kasus-kasus yang sama halnya Ikhwanul Muslimin, seperti kasus Iran Syiah, revolusi jihad di Afganistan, dan Osama bin Laden.

Setelah memaparkan Islam militan, Murden juga memaparkan tentang Islam moderat. Optimisme Islam moderat dilihat dari perkembangan Islam abad ke-21 dengan adanya globalisasi ekonomi dan budaya yang akan mengubah wajah Islam militan menjadi Islam moderat. Namun optimisme terhadap perkembangan Islam moderat ini tidak mengubah tendensi Murden yang mempunyai proporsi lebih banyak dalam mengungkapkan kecemasannya terhadap perkembangan Islam militan.

Sarjana Barat dalam studi Hubungan Internasional, Peter Mandaville mempunyai pendapat yang lebih bijak daripada dua sarjana Barat di atas. Mandaville berpendapat bahwa Islam sangat beragam. Oleh sebab itu, segala hal yang berdampak negatif dalam politik dunia (misalnya terorisme) belum tentu hal itu dari Islam. Menurut Mandaville, Islam seharusnya tidak dipahami secara monolitik, karena bisa terjebak pada menyalahkan Islam sebagai agama dan menggeneralisasi semua umat Islam salah. Menurut Mandaville, Islam dibagi menjadi banyak ragamnya, yakni Islam ideologis yang anti Barat, Islam lingkungan hidup yang berjuang untuk keadilan lingkungan dan Islam yang memperjuangkan banyak hal lainnya (Peter Mandaville, 2009: 118-120).

Untuk itu, perlu dipahami bahwa Islam diterjemahkan secara berbeda dan beragam oleh para penganutnya.

Bagi sarjana SHI Islam, Bassam Tibi Islam telah membentuk peradaban Barat-Eropa, sehingga Islam adalah bagian dari Eropa. Islam Eropa dikonseptakan Tibi: "Euro-Islam" yakni identitas Muslim Eropa. Tibi (2008: 4) berargumentasi, *"the idea of democracy and of democratic peace as the alternative to political Islam. Civil Islam is compatible with democracy, but Islamism is not"*. Menurut Tibi, demokrasi atau teori perdamaian demokratis relevan dengan Islam. Namun tidak cocok bagi kelompok Islamisme (Islam radikal) adalah gerakan Islam melawan Barat yang berusaha mengembalikan sejarah kejayaan Islam. Jadi Tibi sepakat dengan konsep Civil Islam, yakni gerakan Islam yang justru terus berasimilasi dan berakulturasi dengan Eropa.

Selain Tibi, Ide Euro-Islam juga diperjuangkan oleh cucu Hasan al-Bana, yaitu Tariq Ramadan. Ramadan berjuang menjelaskan Islam yang damai. Ramadan memberi penjelasan bagi kaum Eropa yang Ateis dan menebarkan kebencian kepada Islam seperti Ayaan Hirsi Ali. Harapan Ramadan dan Tibi adalah, warga Muslim-Eropa harus sepenuh hati menjadi warga Eropa dan orang-orang Eropa pun harus menerima Islam sebagai bagian dari mereka. Bagi semua orang di dunia, Muslim-Eropa adalah suatu kenyataan yang harus

terwakilkan dalam institusi agar mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya (Tariq Ramadan, 2002).

Bagi sarjana Islam kontemporer, Akbar S. Ahmed memaparkan globalisasi dari sisi umat Islam dan umat Barat, yakni adanya problem identitas dan otentisitas Islam dan Barat. Hal ini dikarenakan oleh proses asimilasi dan akulturasi Islam dan Barat. Ahmed berusaha berfokus pada konteks Islam dan dunia Barat yang seolah-olah berusaha otentik dan menjaga identitasnya, tetapi keduanya problematik. Ahmed berusaha menjelaskan posisi umat Islam di politik global yang ambivalen.

Ahmed menjelaskan hubungan antara Islam dan Barat yang sudah terjalin sejak lama dalam wadah sistem-dunia ekonomi, yakni perdagangan internasional. Menurut pemaparan Wallerstein yang dikutip Ahmed, embrio globalisasi adalah relasi antara kolonial dan koloni. Kolonial berelaborasi dengan para elit wilayah koloni (misalnya penguasa/raja) untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia saat itu. Dari proses inilah terjadi pertukaran budaya atau ekspansi budaya dari Barat ke Timur yang diawali oleh Inggris ke Mesir, Portugal, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia serta negara Barat lainnya.

Pertukaran budaya ini terkait dengan diaspora umat Islam. Diaspora umat Islam menjadi penting dalam politik global. Misalnya kasus yang dipaparkan oleh Richard

T. Antoun tentang seorang mahasiswa kedokteran Yordania yang bersekolah di Jerman bernama Ali. Singkat cerita, pilihan Ali untuk menikah dengan wanita Jerman akan menimbulkan masalah jika ia pulang ke negerinya. Sementara itu, ia pun enggan untuk tetap tinggal di Jerman walaupun semua fasilitas hidup tersedia untuknya. Ali telah melihat negativitas kehidupan masyarakat Jerman, khususnya budaya keluarga Jerman. Tidak mungkin Ali hidup di Jerman dengan budaya keluarga yang banyak bertentangan dengan budaya Islamnya. Dalam konteks kasus ini, Ali mengalami proses deterritorialisasi, yakni bermasalah jika pulang ke Yordania dan bermasalah pula jika tetap di Jerman. Ali adalah warga diaspora yang berada di Jerman, tetapi hidup dalam ruang antara Yordania yang Islam dan Jerman yang sekuler.

Di era globalisasi, diaspora adalah pencarian otentisitas dan identitas tanpa henti. Dengan kata lain, diaspora adalah proses seseorang atau kelompok yang tercerabut identitasnya. Pencarian pekerjaan di era globalisasi yang bersistem kapitalisme lanjut membuat umat Islam bertebaran di dunia Barat dan menjadi bagian dari kehidupan Barat. Dari konteks ini, kasus seperti Ali di atas menjadi kajian empirik dan konseptual yang penting dalam Islam.

Menurut Ahmed, masyarakat Barat seharusnya sudah mulai melihat dan sadar bahwa umat Islam adalah bagian dari

kelokalan mereka. Sudah cukup besar warga Islam yang menjadi buruh-buruh di negara Barat seperti Perancis, Jerman, Inggris, dan AS. Oleh sebab itu, pemikiran kaum orientalis yang melihat Islam sebagai ganas, suka berperang, tribal, eksotik, dan 'asli Islam' sudah tidak berlaku. Dengan mengutip Said, Ahmed menunjukkan bahwa kaum orientalis berusaha menguasai Islam dengan studi tentang Islam. Padahal era globalisasi ini, Islam dikaji bukan lagi dalam konteks sarjana orientalis, tetapi dalam kontekstualisasi kelokalan Islam bersama struktur internasional. Dengan kata lain, Islam adalah bagian dari struktur internasional perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari warga dunia (*citizen of the world*).

Studi tentang diaspora adalah penelitian tentang pencarian identitas dan otentisitas di saat budaya dunia kehidupan baru muncul. Ahmed mencontohkan Muslim-Inggris dan Muslim-AS yang mempunyai keberjarakan budaya. Proses penelitian ini dinamai dengan *act of re-membering* dan *act of re-creating*. Proses ini terkait dengan kasus ketika seseorang akan menikah, menjalin hubungan, aplikasi agamanya di dunia baru mereka, dan relasi sosial tidak hanya dengan non-muslim, tetapi juga dengan sesama muslim. Proses negosiasi dan kontrak sosial inilah yang menjadi tantangan bagi warga diaspora muslim. Selain itu, kasus Islam fundamentalisme merupakan bagian dari penelitian diaspora juga. Ruang yang semakin

kabur membuat sekelompok umat Islam berusaha memperjelas posisinya sebagai umat Islam terkait dengan identitas dan otentisitasnya.

Dari perspektif sarjana Islam, Islam adalah bagian dari politik dunia yang patut diakui keberadaannya. Penyebaran umat Islam di sebagian besar dunia, khususnya negara-negara Barat seperti Eropa menjadikan Islam adalah bagian dari hidup mereka. Bagi Ahmed, Tibi, dan tariq Ramadan, Islam menjadi sesuatu yang tak terhindarkan dari dunia Barat dan masyarakat internasional pada umumnya. Ahmed berargumen sebagai berikut: *"the processes of globalization have influenced traditional cultures and in such a dramatic way that they have raised issues for Muslims which can no longer be ignored"* (Akbar S. Ahmed, 2005: 18). Singkat kata, keberadaan globalisasi membuat sarjana Barat dan Islam memberi perhatian penuh terhadap Islam bersama keberagaman tafsirnya, khususnya budaya/tradisi Islam yang selalu harus diterjemahkan terus-menerus agar sesuai dengan konteks zamannya.

Kesimpulan

Globalisasi memberi peluang bagi Islam untuk bangkit. Menurut sarjana Barat, kebangkitan Islam menciptakan ragam Islam yang berbeda-beda seperti Islam ideologis, Islam militan, dan Islam moderat. Globalisasi yang ditandai arus teknologi, informasi,

komunikasi, pertukaran barang dan jasa, serta tarik-menarik antar pemain di dalamnya, memunculkan berbagai macam gerakan Islam yang merespon kebangkitan dunia Barat atau peradaban Barat.

Artikel ini berusaha mengungkapkan deskripsi bahwa Islam tampil dengan ragam yang berbeda-beda menurut sarjana Barat dan sarjana Islam di era globalisasi. Walaupun sarjana Barat melihat Islam dengan penuh kekhawatiran, tetapi mereka tetap optimis terhadap perubahan. Demikian juga sarjana Islam yang melihat bahwa globalisasi adalah faktor utama Islam dan Barat menjadi ambivalen identitas dan otentisitasnya. Dari sini, Islam dan Barat melebur menjadi suatu tradisi sangat menentukan di era globalisasi. Jadi Islam adalah bagian dari perubahan era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Akbar S., dan Donnan, Hastings, "Islam in the Age of Postmodernity", dalam *Islam, Globalization and Postmodernity* (London dan New York: Routledge dan the Taylor and Francis Group, 2005)
- Balaam, David N., dan Veseth, Michael, *Introduction to International Political Economy* (New Jersey: Prentice Hall, 1996)
- Barber, Benjamin R., *Jihad vs McWorld*, terj. (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2002).
- Brecher Jeremy, dan Costello, Tim, *Global Village or Global Pillage: Economic Reconstruction from the Bottom Up* (Boston, Massachusetts: South End Press, 1994)
- Harvey, David, *Imperialisme Baru*, terj (Yogyakarta dan Jakarta: Resist Book dan IGJ, 2010)
- Hopkins, Dwight N., "Pendahuluan", *Religion/Globalizations*, diedit oleh Dwight N. Hopkins dan Lois Ann Lotentsen (USA: Duke University Press, 2001)
- Huntington, Samuel P., "Will More Countries Become Democratic?" *Political Science Quarterly*, Summer 1984
- Kepel, Gilles, *the Revenge of God* (University Park: Pennsylvania State University Press, 1994)
- Lairson, Thomas D., dan Skidmore, David, *International Political Economy*, 3rd ed. (Belmont, et. al: Thomson Wadsworth, 2003)
- Lewis, Bernard, "Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview," *Journal of Democracy*, Apr. 1996
- Mandaville, Peter, "How Do Religious Beliefs Affect Politics?", dalam *Global Politics: a New Introduction*, diedit oleh Jenny Edkins dan Maja Zehfuss (London dan New York: Routledge, 2009)
- Micklethwait, Wooldridge, Adrian, *A Future Perfect: the challenge and Hidden Promise of Globalization* (UK: Random House Business Books, 2001)
- Mubah, A. Safril, *Teroris Versus Globalisasi: Perlawanan Jaringan Jamaah Islamiyah Terhadap Hegemoni Amerika* (Surabaya: CSGS, 2012)
- Murden, Simon, "Culture in World Affairs", dalam *The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations*, diedit oleh John Baylis dan Steve Smith (New York: Oxford University Press, 2001)
- Pamuji Mugasejati, Nanang, dan Martanto, Ucu, *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme* (Yogyakarta: FISIP UGM, 2006)
- Phillips, Andrew, *War, Religion and Empire: The Transformation of International Orders* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011)
- Ramadan, Tariq, *Teologi Dialog: Islam-Barat*, terj. (Bandung: Mizan, 2002)
- Ritzer, George, *Ketika Kapitalisme Berjingkrang: Telaah Kritis Terhadap Gelombang McDonaldisasi*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Scholte, Jan Aart, "The Globalization of World Politics", dalam John Baylis dan Steve Smith (eds.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International*

Relations, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2001)

Tibi, Bassam, *Political Islam, World Politics and Europe: Democratic Peace and Euro-Islam versus Global Jihad* (London: Routledge, 2008)

Wight, Martin, *International theory: three traditions* (USA: Hollmes & Meier, 1991)

John L. Esposito and James Piscatory, "Democratization and Islam," *Middle East Journal*, Summer 1991

John L. Esposito, *Islam: The Straight Path* (New York: Oxford University Press, 1991)

John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* (Oxford: Oxford University Press, 1992)

John O. Voll and John L. Esposito "Islam's Democratic Essence," *Middle East Quarterly*, Sept. 1994

John O. Voll and John L. Esposito, *Islam and Democracy* (New York: Oxford University Press, 1996)

